

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang sebagaimana telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini terkait dengan kewenangan Notaris dalam membuat akta PKR berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan maka penulis dapat menarik kesimpulan yaitu Notaris memiliki kewenangan dalam membuat akta PKR yang mana kewenangan tersebut terbatas hanya pada pembuktian secara formil, karena pembuktian secara materiil yang berdasarkan Risalah RUPS dibawah tangan tidak lagi menjadi kewenangan Notaris. Hal ini dikarenakan Notaris telah menganggap Risalah RUPS yang dibuat secara dibawah tangan oleh peserta RUPS sesuai dengan kebenarannya dan telah memenuhi Pasal 90 UUPT mengenai pembuatan Risalah RUPS.

#### **5.2 Saran**

Berdasarkan dari permasalahan yang diangkat oleh penulis dalam penelitian ini, maka penulis memiliki beberapa saran yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan tersebut, yaitu:

1. Bagi para peserta RUPS pada saat membuat suatu risalah RUPS, harus mengacu baik dalam proses, pelaksanaan, dan tata cara pembuatannya sesuai dengan UUPT.
2. Pada saat membuat akta PKR, Notaris diharapkan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang terkait dengan pembuatan akta PKR untuk menghindari munculnya permasalahan hukum yang timbul dikemudian hari.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

A. Pitlo, *Pembuktian dan Daluwarsa Menurut Hukum KUHPerdara Belanda*, diterjemahkan oleh M. Isa, Jakarta, 1978

Ahmad Yani dan Gunawan Widjaya, *Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2006

————— *Seri Hukum Bisnis: Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2006

Binoto Nadapdap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2009

Cornelius Simanjuntak dan Natalia Mulia, *Organ Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2009

C.S.T Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi)*, Jakarta, 2005

Frans Satrio Wicaksono, *Tanggung Jawab Pemegang Saham, Direksi, dan Komisaris Perseroan Terbatas (PT)*, Jakarta, 2009

G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, Jakarta, 1983

Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, 2008

————— *Penafsiran Tematik Hukum Notaris Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Surabaya, 2015

Handri Raharjo, *Hukum Perusahaan*, Yogyakarta, 2009

Herlien Budiono, *Akte Notaris Melalui Media Elektronik, Upgrading-Refreshing Course Ikatan Notaris Indonesia*, Bandung, 2003

————— *Notaris dan Kode Etiknya, Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 2007

- *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata Dibidang Kenotariatan*, Bandung, 2007
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, 1995
- Irawan Soerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*, Surabaya, 2003
- Johannes Ibrahim, *Hukum Organisasi Perusahaan-Pola Kemitraan dan Badan Hukum*, Bandung, 2006
- M. Ali Boediarso, *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Tahun*, Jakarta, 2
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, 2008
- *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2009
- Munir Fuady, *Perlindungan Saham Minoritas*, Bandung, 2005
- Nindyo Pramono, *Bunga Rampai Hukum Bisnis*, Bandung, 2006
- Philipus M. Hadjon, *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*, Surabaya, 2001
- Ronny Hanitijo Soemitio, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1994
- R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bandung 1989
- Sentosa Sembiring, *Hukum Perusahaan Tentang Perseroan Terbatas*, Bandung, 2012
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, 1986
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta, 2001
- Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, 1981
- Tan Thong Kie, *Studi Notariat dan Serba-Serbi Praktek Notaris*, Jakarta, 2007
- Wahyono Darmabrata, *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Menyikapi Bentuk-Bentuk Penyimpangan Fiduciary Duty Direksi dan Komisaris Perseroan Terbatas*, 2003

Wirjono Prodjodikoro, *Azas-azas Hukum Perjanjian*, Bandung, 1989

#### **B. Jurnal**

Siti Hapsah Isfardiyana. 2015. *Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas Dalam Pelanggaran Fiduciary Duty*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. 2 (1). <http://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/7284> Diakses pada tanggal 08 Mei 2018 pukul 18.15 WIB

#### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas